

NASKAH PUBLIKASI

**KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
SRAGEN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN PERTANIAN KOMODITAS
PADI TAHUN 2016**

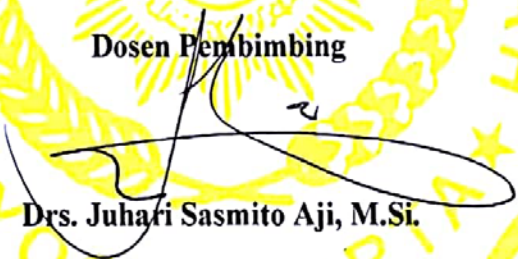
Disusun Oleh:

BAGAS SWASTOMO
20130520323

Telah disetujui dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Tempat : Ruang Ujian IP
Jam : 10.00 - 11.00 WIB

Dosen Pembimbing


Drs. Juhari Sasmito Aji, M.Si.

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik**


Dr. Tim Purwaningsih, S.IP., M.Si



**Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan**


Dr. Muchamad Zaenuji, M.Si

**KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN KABUPATEN
SRAGEN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN PERTANIAN
KOMODITAS PADI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016**

Oleh: Bagas Swastomo

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam melaksanakan pembangunan komoditas padi di tahun 2016 ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam melakukan pembangunan pertanian komoditas padi di Kabupaten Sragen selama tahun 2016. Dengan demikian penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam bidang pembangunan pertanian komoditas padi tahun 2016 dan apa saja faktor yang berpengaruh pada produktivitas komoditas padi di Kabupaten Sragen?

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang diharapkan mampu menggali informasi, menggambarkan, dan menganalisa lebih mendalam. Adapun teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pembangunan pertanian komoditas padi dilakukan dengan upaya peningkatan produktivitas tanaman padi yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani padi. Adapun produktivitas komoditas padi di Kabupaten Sragen pada tahun 2016 adalah sebesar 64,07 ku/ha atau 99,14% dari yang ditargetkan atau dapat dikatakan baik. Pada aspek responsibilitas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah sesuai dengan prinsip administrasi yang berlaku. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen antara lain adalah dengan memberikan bantuan alat dan mesin pertanian serta pendampingan dari pra tanam hingga pasca panen dan telah dilakukan dengan baik. Pelayanan berupa penyerapan aspirasi dan pendampingan berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan modernisasi pertanian terlaksana dengan baik. Secara keseluruhan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam melaksanakan pembangunan pertanian komoditas padi tahun 2016 sudah baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan kompleks yang dapat menghambat pembangunan pertanian, diantaranya adalah alih fungsi lahan pertanian, kurangnya minat pemuda untuk bertani, terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi, dan ketidakstabilan harga jual panen.

Adapun saran dari peneliti adalah diharapkan kedepannya tetap melakukan pembenahan-pembenahan antara lain perluasan lahan pertanian dan memperketat regulasi alih fungsi lahan pertanian, memperluas obyek penyuluhan pertanian terutama dikalangan pemuda, mengkampanyekan penggunaan pupuk organik, pengoptimalan irigasi untuk menghindari terjadinya kekeringan sehingga

berakibat gagal panen, dan peningkatan alokasi dana baik dari pusat maupun daerah untuk tercapainya cita-cita nasional yaitu pertanian yang berdaulat.

Kata Kunci: Kinerja, Pertanian, Ketahanan Pangan, Padi

A. Pendahuluan

Pada sensus pertanian terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2013 menyatakan bahwa jumlah petani di Indonesia hanya tinggal 26,14 juta rumah tangga, padahal pada tahun 2003, jumlah petani di Indonesia besarnya mencapai 31,17 juta rumah tangga. Mayoritas petani berusia pada kisaran 45 hingga 54 tahun, bahkan sebanyak 32,6% berusia diatas 54 tahun. Hasil tersebut menyatakan bahwa bertambahnya tahun dan berkembangnya teknologi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah petani di Indonesia (Kompas.com, 2014)

Selain jumlahnya yang semakin berkurang, tingkat pendidikan para petani di Indonesia (Berdasarkan Survei Pertanian BPS 2013) sebagian besar hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Rinciannya adalah sebagai berikut; Sebanyak 32,7% tidak tamat Sekolah Dasar, kemudian 39,9% tamat Sekolah Dasar, dan 27,4% berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke atas.

Dalam hal sarana dan prasarana pertanian, pemerintah Indonesia saat ini fokus menggarap infrastruktur yang bertujuan meningkatkan mobilitas perekonomian, termasuk dalam sektor pertanian. Pembangunan waduk atau bendungan dan revitalisasi irigasi dianggap sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah menargetkan akan membangun 65 waduk baru dan diperkirakan dapat menambah tampungan air sebesar 6.544,75 meter kubik. Bendungan tersebut diharapkan mampu mengatasi problem perairan sawah dengan luas 460.382 hektar.

Sebagai efisiensi pembinaan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan peranan petani dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Sragen, Dinas Pertanian Kabupaten Sragen membentuk sebuah kelembagaan bernama Kelompok Tani (PokTan). Selain meningkatkan mutu baik petani maupun hasil pertaniannya, Kelompok Tani (PokTan) ini diharapkan dapat mencetak petani-petani yang mandiri dan berkemampuan. Hingga tahun 2016, jumlah kelompok tani di Kabupaten Sragen sudah terdapat 1.328 kelompok yang menyebar hingga ke tingkat desa.

Penyuluhan dengan pendekatan kelompok dilakukan untuk tercapainya tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani yang layak. Disamping itu, pembinaan juga dilakukan dengan tujuan agar para petani menjalin kerjasama untuk saling berbagi ilmu atau saling belajar guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, proses produksi, proses kerjasama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) dan kerjasama dengan yang pihak-pihak lainnya.

Hasil produksi tanaman padi di wilayah kabupaten Sragen terhitung sejak tahun 2012 hingga pada tahun 2016 cenderung terus meningkat, terkecuali pada tahun 2014 yang kala itu terdapat problematika cuaca dan juga bencana banjir sehingga membuat beberapa wilayah di kabupaten Sragen gagal panen. Hasil produksi padi di Kabupaten bisa dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Produksi Padi Kabupaten Sragen tahun 2012-2016.

Tahun	Luas Area Panen (Ha)	Hasil Panen (Ton)
2012	96.893	582.564
2013	100.044	601.040
2014	100.061	585.503
2015	97.444	628.743
2016	39.928	654.709

Sumber: BPS Sragen, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013, luas area panen padi di kabupaten Sragen adalah sebesar 96.893 hektar dan menghasilkan 582.564 ton gabah. Kemudian di tahun 2014, dari luas area panen sebesar 100.044 hektar dapat menghasilkan 601.040 ton gabah. Tahun 2015, area yang panen adalah seluas 100.061 hektar dengan hasil panen sebesar 585.503 ton. Kemudian pada 2016, luas area panen 97.444 hektar dengan hasil produksi 628.743 ton. Terakhir pada tahun 2017, Kabupaten Sragen kembali mengalami peningkatan hasil panen padi dengan total 654.709 ton dengan cakupan luas lahan pertanian 39.928 hektar. (BPS Sragen, 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa meskipun luas area lahan panen padi di Kabupaten Sragen, khususnya 2 tahun terakhir terus berkurang. Namun produksi komoditas padi di Kabupaten Sragen justru cenderung meningkat. Peningkatan hasil panen tersebut tentu tidak luput dari bagaimana kualitas pelaku pertanian baik pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, maupun para petani itu sendiri. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam pembangunan pertanian komoditas padi di Kabupaten Sragen sehingga produksi tanaman padi terus meningkat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam bidang pembangunan pertanian komoditas padi tahun 2016?
2. Apa saja faktor yang berpengaruh pada produktivitas komoditas padi di Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam pembangunan pertanian komoditas padi tahun 2016.
2. Memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi pertanian komoditas padi.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Kinerja Organisasi

Secara etimologi kinerja berawal dari kata prestasi kerja (performance). Menurut Veithzal (2009) Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.

Kemudian menurut Sedarmayanti (2007) kinerja merupakan sistem untuk mengetahui dan menilai pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, atau perpaduan dan hasil kerja yang harus dicapai serta kompetensi bagaimana orang tersebut mencapainya.

Setiap perusahaan, organisasi, maupun birokrasi harus mempunyai standar untuk menilai kinerja karyawan atau pegawainya. Dengan adanya standar penilaian atau indikator-indikator penilaiannya maka dapat memudahkan proses penilaian kinerja yang kemudian sebuah perusahaan, organisasi, maupun birokrasi dapat menemukan solusi atau langkah apa saja yang harus dilakukan untuk tercapainya tujuan yang hendak dicita-citakan oleh organisasi, perusahaan, atau birokrasi tersebut.

Penilaian kinerja juga berfungsi sebagai penentuan pelatihan kerja kepada pegawai atau karyawan serta memberikan tanggung jawab secara tepat sesuai bidang keahlian karyawan atau pegawai. Selain itu hasil penilaian kinerja dapat menjadi dasar penentuan kebijakan dalam menetapkan gaji atau promosi jabatan.

Dalam menilai kinerja suatu organisasi dibutuhkan beberapa aspek yang dapat digunakan untuk mengukur bagaimana kegiatan dilakukan dan bagaimana hasil dari kegiatan tersebut. Menurut Dwiyanto (2006) aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Produktivitas

Produktivitas dapat dinilai dari membandingkan antara masukan atau input dan keluaran atau output. Jika hasil yang dikeluarkan lebih tinggi atau lebih besar dari masukan/biaya produksinya maka dinilai efisien atau berproduktivitas tinggi, begitupun sebaliknya.

2. Aspek Kualitas Pelayanan

Organisasi memberikan servis yang sesuai dengan standar pelayanan dengan efektif.

3. Aspek Responsivitas

Kemampuan organisasi dalam menanggapi atau mempunyai daya tanggap atas keinginan dan kebutuhan dari masyarakat.

4. Aspek Responsibilitas

Responsibilitas dalam organisasi dapat diartikan tanggung jawab suatu organisasi dimana dalam penerapannya bergantung pada keahlian pegawai, biasanya berkaitan dengan kebijakan, administrasi, atau program-program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Singkatnya, responsibilitas merupakan bagaimana kesesuaian antara kegiatan dengan prinsip-prinsip administrasi atau kebijakan.

5. Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban tanggung jawab atas berhasil atau gagalnya suatu misi, kebijakan, program-program, atau perencanaan kerja yang lain.

2. Organisasi Publik

Organisasi publik merupakan pengembangan dari teori organisasi, sehingga dalam memahaminya dapat ditinjau melalui sudut pandang teori organisasi. Fahmi (2013) berpendapat bahwa organisasi publik adalah wadah yang mempunyai multi peran dan bertujuan untuk memberi dan mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemilikinya.

Sedangkan Stephen P. Robbins dalam Fahmi (2013) berpendapat organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Organisasi publik pada bentuk organisasi dalam pemerintahan dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan). Menurut Prof. Dr. Taliziduhu Ndaha (2005), organisasi publik merupakan organisasi yang berdiri untuk mencukupi kebutuhan rakyat akan jasa publik dan layanan sipil.

Organisasi ini mempunyai tujuan melayani kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan berorientasi hanya kepada pelayanan masyarakat dan bukan untuk mencari profit atau keuntungan.

Stoner dan Walker (1986) berpendapat bahwa pengorganisasian merupakan satu proses dimana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

Sesuai amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara mempunyai kewajiban dalam melayani setiap warga Indonesia dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dengan kerangka pelayanan publik. Adanya organisasi publik adalah upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap penduduk atau warga Negara serta mewujudkan tanggung jawab Negara dan korporasi

dalam rangka penyelenggaraan pelayanan masyarakat serta dalam penerapannya diperlukan norma hukum yang mempunyai aturan jelas.

3. Pemerintah Daerah

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah meliputi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Pemerintahan daerah dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahannya diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengurus daerahnya masing-masing atau biasa disebut dengan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah memerlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah dengan cara proporsional, berkeadilan, bebas praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga terdapat perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (HAW. Widjaja, 2007). Adapun prinsip otonomi daerah menurut Rozali Abdullah (2007) adalah meliputi.

1. Prinsip otonomi luas

Otonomi luas yakni pelimpahan tugas, hak, wewenang, dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan potensinya diluar bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan-kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

2. Prinsip otonomi nyata

Otonomi nyata merupakan keleluasaan pemerintah daerah dalam menangani urusan pemerintahan yang telah ada dan berpotensi tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

3. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab

Otonomi yang bertanggungjawab merupakan perwujudan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan yang benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan rakyat daerahnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian tentang Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam pembangunan pertanian komoditas padi tahun 2016 menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penyajian data dengan menggunakan kata atau kalimat yang bersumber baik dari data tekstual maupun lisan.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dengan mempersempit ruang lingkup penelitian pada kepegawaian yang mempunyai korelasi dengan pembangunan pertanian.

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga jenuh dan tuntas. Adapun analisis datanya sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi dapat diartikan sebagai merangkum atau mencari pokok/inti bahasan dengan mencari tema dan polanya. Dengan

demikian hasil data yang direduksi akan memberikan gambaran secara jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan atau pencarian data selanjutnya jika diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Dengan menyajikan data secara singkat dan jelas dapat memudahkan dalam memahami substansi dari data yang diperoleh.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi(*Conclusion Drawing/Verification*)

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dengan membulatkan makna pada setiap data dan gejala yang telah terkumpul atau diperoleh di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membaca seluruh data dan transkrip wawancara yang berisikan statement atau pernyataan dari informan dan mencari makna yang terkandung dalam setiap pernyataan baik secara implisit maupun eksplisit.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam melaksanakan pembangunan pertanian terkhusus pada komoditas tanaman padi. Kedua Dinas tersebut mempunyai fungsi yang vital sebagai pelaksana pemerintah daerah yang diharuskan melakukan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan umum, hingga pembinaan pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Sragen. Dinas Pertanian Kabupaten Sragen dalam pembangunan pertanian komoditas padi lebih berfokus pada bidang produksi tanaman padi. Sedangkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen lebih berkonsentrasi pada bidang pendampingan petani selama proses bertani, yakni masa sebelum tanam hingga pasca panen.

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam melaksanakan pembangunan pertanian pada komoditas padi dapat

dilihat beberapa aspek. Adapun aspek yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspek produktivitas, aspek responsibilitas, aspek responsivitas, aspek kualitas layanan, dan aspek akuntabilitas. Kelima aspek ini digunakan penulis sebagai sarana untuk membedah apa saja yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Sragen selama satu tahun yaitu pada tahun 2016.

Pertama, dari segi produktivitas, Dinas Pertanian Kabupaten Sragen pada tahun 2016 menargetkan produktivitas tanaman padi sebesar 64,62 Ku/Ha. Menurut Bapak Sugeng selaku pegawai Dinas Pertanian bagian umum dan kepegawaian, menuturkan bahwa problematika pertanian di Sragen adalah terus menurunnya lahan pertanian. Terus terjadinya alih fungsi lahan tentunya juga berimbas pada jumlah pertanian yang dihasilkan. Adapun angka produktivitas komoditas padi yang dicapai pada tahun 2016 adalah sebesar 64,07 Ku/Ha. Berdasarkan angka tersebut capaian kinerja Dinas Pertanian dalam melakukan peningkatan produktivitas adalah sebesar 99,14%. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,55 Ku/Ha atau 0,85%. Namun meskipun mengalami penurunan produktivitas tanaman padi, Kabupaten Sragen tetap menjadi salah satu daerah lumbung padi di Indonesia. Angka produktivitas tanaman padi skala nasional adalah sebesar 52,36 Ku/Ha, sedangkan angka produktivitas tanaman padi skala provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 60,39 Ku/Ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas tanaman padi skala nasional, maupun skala provinsi, Kabupaten Sragen masih berada di atasnya.

Kemudian selanjutnya pada dinas ketahanan. Menurut salah satu pegawai Dinas Ketahanan Pangan bidang penyuluhan, Bapak Supriyanto, Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2016 lebih berfokus pada pembangunan penyuluh swadaya berupa perekrutan penyuluh swadaya. Hal yang mendasari adanya program tersebut adalah karena kurangnya tenaga kerja penyuluh dari Dinas Ketahanan

Pangan itu sendiri. Bapak Supriyanto juga mengatakan bahwa usia rata-rata penyuluh swadaya sudah tergolong sudah tua, yaitu 55 tahun, selain itu Dinas Ketahanan juga kesulitan melakukan peremajaan usia penyuluh swadaya dikarenakan kurangnya minat pada generasi muda untuk terjun dalam pertanian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen pada tahun 2016 menargetkan perekrutan penyuluh swadaya sebanyak 30 orang dan jumlah yang berhasil terekrut telah sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu sebanyak 30 orang. Selanjutnya penyuluh swadaya tersebut akan diberikan pendidikan dan pelatihan dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi.

Kedua, aspek responsibilitas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dapat dilihat dengan adanya rencana strategis yang berfungsi sebagai landasan dan juga parameter untuk mewujudkan cita-cita yang tertera pada visi misi dari Kabupaten Sragen “Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”. Adanya rencana strategis juga dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pembantu pemerintah daerah telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi. Hal tersebut diperjelas dengan keterangan Bapak Sugeng selaku pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sragen bagian umum dan kepegawaian, menjelaskan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Sragen berfokus pada 3 (tiga) hal pokok yaitu peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, dan peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

Selain itu, Bapak Supriyanto, salah satu pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen pada bidang penyuluhan juga menjelaskan bahwa Dinas Ketahanan menetapkan 7 (tujuh) program, yaitu: program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan ketahanan pangan, program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan

penerapan teknologi pertanian/perkebunan, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dan program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan. Dengan adanya data dan keterangan tersebut dapat dikatakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Sragen telah bekerja sesuai dengan prinsip administrasi yang telah ditetapkan.

Ketiga, aspek responsivitas. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen diharuskan dapat membaca kebutuhan masyarakat tani, menyusun program prioritas dan kebijakan, serta menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat tani. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen sebelum melakukan penyusunan program hingga ketika program berjalan menerapkan 3 (tiga) metode untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan dan apa saja kebutuhan dari para petani. Ketiga metode itu adalah musyawarah perencanaan pembangunan pertanian, komunikasi langsung dengan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN), dan menyediakan sarana kritik, saran dan pengaduan. Menurut Bapak Supriyanto, selaku pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen di bidang penyuluhan, para petani jarang menyampaikan aspirasi maupun keluhan-keluhannya di kantor dinas, melainkan lebih sering menyampaikan segala keperluannya ketika ada pertemuan langsung di lapangan. Adapun keluhan-keluhannya, menurut Bapak Supriyanto, adalah seputar pupuk dan harga jual padi. Penanganan keluhan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian ditempat jika memungkinkan diselesaikan ditempat dan jika tidak memungkinkan, maka menunggu pengkajian lebih mendalam terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu sebagai penundaan. Selain itu, menurut pendapat salah satu ketua kelompok tani yang bertempat tinggal di dukuh Bulakrejo, Bapak Suparno, para petani merasa sangat terbantu dengan adanya pertemuan rutin antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan para petani.

Adapun masalah-masalah soal pertanian yang sering ditemui, menurut Bapak Suparno, yaitu serangan hama, harga jual, dan pengairan. Dengan terjalinnya komunikasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan para petani secara langsung tersebut maka responsivitas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dapat dikatakan baik.

Keempat, aspek kualitas layanan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam melakukan pelayanan kepada petani terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pelayanan fisik dan pelayanan non fisik. Pelayanan fisik yang dilakukan adalah penyediaan sarana prasarana yang dinilai dapat menunjang kebutuhan petani, baik bantuan alat dan mesin pertanian, maupun sarana prasarana yang dibutuhkan guna melakukan penyuluhan pertanian. Sedangkan pelayanan non fisik adalah meliputi pemberian fasilitas pendampingan kepada para petani dari pra tanam hingga pasca panen. Adapun pelayanan fisik kepada petani yang telah dilakukan pada tahun 2016 adalah bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor roda dua sejumlah 204 unit, traktor roda empat sejumlah 8 unit, mesin pemanen (*combine harvester*) ukuran kecil sejumlah 84 unit, dan mesin pemanen (*combine harvester*) ukuran sedang sejumlah 20 unit.

Menurut Bapak Suparno selaku salah satu ketua kelompok tani yang bertempat tinggal di Dukuh Bulakrejo, secara keseluruhan pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen sangat membantu para petani, meskipun terkadang ketika mengajukan permohonan bantuan alat dan mesin pertanian membutuhkan waktu yang relatif lama karena membutuhkan pengkajian lebih lanjut. Kemudian pelayanan non fisik yang dilakukan adalah melakukan pertemuan rutin dengan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN). Sama seperti pada poin responsivitas diatas, pertemuan ini berfungsi sebagai penyerapan aspirasi dari para petani serta mengetahui apa saja problematika yang terdapat dilapangan yang kemudian

ditindaklanjuti dengan pemecahan masalah atau pencarian solusi. Berdasarkan data dan keterangan diatas menurut peneliti secara keseluruhan pelayanan kepada petani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen sudah baik.

Kelima, aspek akuntabilitas. Tujuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen adalah membantu pemerintah daerah dengan melakukan pelayanan kepada para petani. Pelayanan tersebut berupa program-program yang sudah tentu harus dapat dipertanggungjawabkan. Terjalannya komunikasi antar internal pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maupun antara pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan para petani menjadi hal yang vital demi tercapainya saling keterbukaan. Menurut Bapak Sugeng selaku pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, komunikasi yang terjalin dengan internal sudah berjalan dengan lancar. Senada dengan hal tersebut, Bapak Supriyanto, selaku pegawai Dinas Ketahanan Pangan bidang penyuluhan juga menyampaikan bahwa komunikasi yang terjalin antar internal sudah bagus. Bapak Supriyanto juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan para petani juga sudah berjalan dengan baik dengan adanya pertemuan rutin dengan gabungan kelompok tani. Kemudian, untuk mengukur keberhasilan atau melihat perkembangan atas hasil kerja yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan evaluasi setiap tahun. Evaluasi yang dilakukan antara lain adalah evaluasi program, evaluasi tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), dan evaluasi alat dan mesin pertanian. Dengan adanya evaluasi tersebut maka dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pertanian, dalam hal ini adalah tanaman padi. Adapun kendala-kendala yang ditemukan pada saat evaluasi tersebut yang pertama adalah gagap teknologi pertanian pada petani padi. Kedua, permasalahan pra tanam seperti pencarian bibit dan pengolahan tanah. Ketiga, permasalahan selama proses tanam hingga pra panen seperti pengairan, pemupukan, serangan

hama. Permasalahan ketika panen hingga pasca panen seperti alat dan mesin pemanen, penjualan, dan harga jual,.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian tentang bagaimana kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dalam melaksanakan pembangunan pertanian komoditas tanaman padi di tahun 2016, kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek produktivitas, aspek responsibilitas, aspek responsivitas, aspek kualitas layanan, dan aspek akuntabilitas.

1. Dari segi produktivitas, capaian kinerja Dinas Pertanian dalam melakukan peningkatan produktivitas adalah sebesar 99,14% dan dapat dikatakan cukup baik. Kemudian selanjutnya, pada dinas ketahanan pangan, perekrutan penyuluh swadaya telah sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu sebanyak 30 orang atau dapat dikatakan baik.
2. Pada aspek responsibilitas, dilihat dengan adanya rencana strategis yang berfungsi sebagai landasan dan juga parameter untuk mewujudkan cita-cita yang tertera pada visi misi dari Kabupaten Sragen. Dengan adanya data dan keterangan yang tertera pada pembahasan diatas dapat dikatakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Sragen telah bekerja sesuai dengan prinsip administrasi yang telah ditetapkan.
3. Pada aspek responsivitas dan kualitas pelayanan, penyerapan aspirasi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dapat dikatakan cukup efektif terutama adanya pertemuan secara langsung antara pihak dinas dengan petani. Selain itu sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dapat dikatakan sudah cukup baik.

4. Pada aspek akuntabilitas. Upaya untuk mengukur keberhasilan atau melihat perkembangan atas hasil kerja yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa evaluasi setiap tahun berupa evaluasi program, evaluasi tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), dan evaluasi alat dan mesin pertanian telah dilaksanakan dengan rutin dan dapat dikatakan baik.
5. Pembangunan pertanian komoditas padi di Kabupaten Sragen masih terdapat beberapa problematika kompleks yang menghambat pembangunan pertanian antara lain terus berkurangnya lahan untuk bertani, kurang minat kalangan muda untuk terjun dan terlibat pada bidang pertanian, ketersediaan pupuk subsidi, dan ketidakstabilan harga jual hasil panen.

Terlepas dari beberapa permasalahan diatas, secara keseluruhan peneliti menyimpulkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen pada tahun 2016 sudah baik dan diharapkan Kabupaten Sragen kedepannya tetap menjadi daerah lumbung padi nasional.

2. Saran-Saran

1. Perlu diadakan perluasan lahan pertanian dan memperketat regulasi perizinan tentang alih fungsi lahan pertanian
2. Memperluas obyek penyuluhan pertanian terlebih kepada para pemuda agar tertarik untuk terjun dalam bidang pertanian
3. Mengkampanyekan penggunaan pupuk organik agar petani tidak bergantung dengan pupuk kimia, selain bermanfaat untuk efisiensi dana, penggunaan pupuk kimia berlebihan sangat mungkin dapat merusak nutrisi tanah
4. Perbaiki dan pengoptimalan irigasi sehingga pasokan pengairan lahan pertanian tetap terjamin

5. Peningkatan alokasi dana dan perhatian yang lebih untuk pembangunan pertanian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna tercapainya kedaulatan pangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dharma, Surya. 2004. *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomer 3*. Juni. Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2013. *Perilaku Organisasi, Teori, Aplikasi, dan Kasus*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardikanto, T. 2003. *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Sukoharjo: PUSPA
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, J. Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-14*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchsan, Siswanto Sunarno. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustopadidjaja, Ar. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Ndraha, Talidziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pfiffner, John M & Presthus, Robert V. 1960, *Public Administration*. New York: The Ronald Press Co.
- Rivai, Veitzhal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori Ke Praktik Edisi 1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rivai, Veithzal. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Ruslan, Rosady. 2008. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sedarmayanti. 2007. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung; Penerbit Bandar Maju.
- Stoner dan Wankel. *Manajemen Industri, Alih Bahasa: Sutanto*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan ke 17. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Weber, Max. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. Diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons. New York: Oxford University Press.
- HAW, Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 54 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sragen

Internet

- Barilla Center For Food & Nutrition Foundation. (Juni, 2016). *Food Sustain Ability*. Diakses pada 19 Desember 2017, 14.30 WIB dari [Foodsustainability.eiu.com](http://foodsustainability.eiu.com):
<http://foodsustainability.eiu.com/country-ranking/>
- Cendana News. (15 Maret 2016). *200 Hektare Lahan Produktif di Sragen Rusak Akibat Proyek Nasional*. Diakses pada 4 April 2018, 20.42 WIB, dari

Cendananews.com:

<http://www.cendananews.com/2016/03/200-hektare-lahan-produktif-di-sragen-rusak-akibat-proyek-nasional.html>

Kompas. (12 Agustus 2014). *Ini Hasil Sensus Pertanian 2013*.

Diakses pada 19 Desember 2017, 14:57 WIB dari Kompas.com:

<http://ekonomi.kompas.com/read/2014/08/12/112617026/Ini.Hasil.Sensus.Pertanian.2013>

BPS Kabupaten Sragen (22 Desember 2016). *Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen 2001-2015*. Diakses pada

20 Desember 2017, 15.29 WIB dari Sragenkab.bps.go.id:

<http://sragenkab.bps.go.id/dynamictable/2016/12/22/116/luas-panen-dan-produksi-padi-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sragen-2011-2015.html>